

IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT EKSPLOITASI : PERAN SAVE THE CHILDREN TERHADAP KASUS PEKERJA ANAK DI SULAWESI SELATAN

Febrina Wimartha¹, Novriest Umbu Walangara Nau², Triesanto Romulo Simanjuntak³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi / Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Article History

Received : 7-Juli-2023
Revised : 7-Juli-2023
Accepted : 14-Juli-2023
Published : 14-Juli-2023

Corresponding author*:

Febrina Wimartha

Contact:

febrinaw2102@gmail.com

Cite This Article:

Wimartha, F., Nau, N. U. W., & Simanjuntak, T. R. (2023). IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT EKSPLOITASI : PERAN SAVE THE CHILDREN TERHADAP KASUS PEKERJA ANAK DI SULAWESI SELATAN. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(04), 83–95.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04.761>

Abstract: *Fulfillment of children's rights is an important agenda of the 2030 sustainable development that has been collectively agreed upon for its implementation. However, it is not easy to achieve this goal as actions leading to child exploitation are still prevalent in society. One form of exploitation is child labor, which is a global issue, especially in rural areas. Number of cases has been unstable and tends to increase in recent years. The occurrence of these cases is caused by several factors, with poverty being the most dominant factor. COVID-19 pandemic which has affected the world, poses a challenge to the recovery of these cases as it has led to changes across all sectors including the economic decline that impacts the increase in child labor cases. This research aims to examine the strategies of stakeholders particularly the participation of non-state actors specifically Save the Children, who have been actively addressing child issues in various countries including Indonesia through their programs in different regions. The research methodology used is qualitative, presenting descriptive data through a case study obtained from documentation techniques. Effectiveness of collaboration among stakeholders in achieving shared goals is evident in the agreement reached. The willingness of each actor to engage in addressing child labor cases serves as evidence. Positive response from the local community that has been helped is a success in implementing the joint strategies. Although these cases cannot be completely eradicated, if continuous synergy is achieved through coordination and collaboration among the actors gradual recovery can occur.*

Keywords: *Child Welfare, Sustainable Development 2030, Child Labor, Save the Children.*

Abstrak: Pemenuhan hak atas anak merupakan agenda penting dari pembangunan berkelanjutan 2030 yang telah disepakati bersama penerapannya, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut pasalnya tindakan yang mengarah kepada eksploitasi anak masih terus ditemukan di masyarakat. Salah satu bentuk eksploitasi ialah pekerja anak yang menjadi permasalahan global khususnya di wilayah pedesaan, angka kasus yang dihasilkan tidaklah stabil cenderung meningkat di beberapa tahun terakhir. Penyebab kasus terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kemiskinan yang didapati menjadi penyebab paling dominan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia menjadi salah satu tantangan pemulihan kasus karenanya menyebabkan perubahan di seluruh sektor negara salah satunya kemerosotan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus pekerja anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi para pemegang kepentingan khususnya partisipasi aktor non-negara dalam hal ini Save the Children yang telah bergerak mengatasi permasalahan anak di berbagai negara salah satunya Indonesia, melalui program-program mereka diberbagai wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memaparkan data secara deskriptif melalui studi kasus yang didapatkan dari teknik dokumentasi. Adanya kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama oleh para pemegang kepentingan yang diimplementasikan lewat kerjasama diketahui sangat efektif dalam mencapai percepatan pemulihan kasus, ketertarikan setiap aktor untuk melibatkan diri di kasus pekerja anak ini dapat menjadi bukti. Tanggapan positif dari masyarakat daerah yang terbantu menjadi keberhasilan penerapan strategi bersama, walaupun kasus ini belum dapat dihapuskan jika terus disinergikan untuk dicapai secara bersama lewat koordinasi atau kerjasama antar para aktor maka perlahan-lahan pemulihan dapat terjadi.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Anak, Pembangunan Berkelanjutan 2030, Pekerja Anak, Save the Children.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk ia yang masih di dalam kandungan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengenai Perlindungan Anak [1]. Berdasarkan peraturan tersebut oleh karena itu layaknya orang dewasa anak juga perlu mendapatkan haknya seperti pendidikan, perlindungan, keterampilan, pengajaran yang layak untuk menunjang kualitas kehidupan mereka. Sangat disayangkan hingga saat ini pemenuhan hak atas anak belum tercipta dengan baik akibat maraknya praktik berbahaya yang menghambat tumbuh kembang anak, pelanggaran ini diakibatkan melalui beberapa faktor seperti budaya, keluarga, ekonomi, ataupun lingkungan. Contohnya dengan melekatnya kebudayaan yang masih di percaya oleh sebagian masyarakat dapat meningkatkan kasus perkawinan anak, perkawinan di bawah umur kerap masih menjadi tradisi banyak keluarga. Selain itu melihat dari sisi ekonomi, meningkatnya kemiskinan memaksa anak untuk turut terbebani dalam meningkatkan perekonomian keluarga salah satunya dengan cara bekerja padahal sudah jelas bahwa praktik kerja di bawah umur dilarang. Masih banyak kasus lain yang dapat menunjukkan maraknya praktik berbahaya terhadap anak, bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 5.953 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2021, angka tersebut didapatkan dari 2.971 berupa kasus Pemenuhan Hak Anak melalui beberapa klaster seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan kesehatan dasar. Angka selanjutnya didapatkan melalui Kasus Perlindungan Khusus Anak seperti, korban kekerasan fisik, kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi, sebanyak 2.982 kasus [2]. Melihat berkembangnya kasus yang masih tercatat pemangku kepentingan terus berupaya merealisasikan peningkatan perlindungan anak, terlebih agenda ini telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi kebijakan nasional dengan sejumlah langkah didalamnya, antara lain peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Kebijakan Perlindungan Anak ini diharapkan untuk dapat terus diupayakan sampai terealisasikan pada tahun 2024.

Terjadinya pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak terhadap pelanggaran eksploitasi anak, hal ini dikarenakan lewat pandemi mengakibatkan banyak perubahan bagi anak ataupun keluarga. Peningkatan kasus kemiskinan juga terjadi, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa September 2020 peningkatan terjadi sebanyak 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya [1]. Peningkatan perceraian sebagai dampak dari hubungan orang tua yang tidak harmonis selama pandemi juga menjadi penyebab eksploitasi, selain itu pengaruh pembelajaran daring yang diterapkan semasa pandemi juga menjadi salah satu faktor. Melalui beberapa faktor tersebut menjadi alasan terjadinya kasus eksploitasi seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, perdagangan anak, atau pekerja anak sebagai dampak dari peningkatan kemiskinan selama pandemi. Pekerja anak merupakan salah satu tindak kriminal terhadap anak yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus, pada hakikatnya tindakan ini melanggar hak anak karena bukan tanggung jawab mereka untuk bekerja melainkan belajar, bermain, bersenang-senang, serta memperoleh hak dan kesempatan untuk mencapai tujuannya. Saat pandemi Covid-19 angka pekerja anak global meningkat sebanyak 160 juta setelah empat tahun terakhir angka pekerja anak yang menurun, Indonesia sendiri di tahun 2020 angka pekerja anak naik menjadi 3,25% setelah tahun sebelumnya berhasil menurun sejumlah 2,35% untuk kategori anak usia 10-17 tahun [3]. Wilayah perdesaan menjadi daerah terbanyak kasus pekerja anak bahkan dalam 2019-2021 proporsinya lebih tinggi dibanding perkotaan. Wilayah agraris Indonesia disebut sebagai salah satu faktor meningkatnya pekerja anak di perdesaan, lahan pertanian yang luas menjadi tantangan tersendiri terhadap peningkatan pekerja anak. Dilihat dari urgensi kasus yang ada untuk itu Presiden Joko Widodo juga mencantumkan secara spesifik mengenai upaya penurunan angka pekerja anak kedalam kebijakan nasional tentang Perlindungan Anak.

Pemenuhan hak terhadap anak juga tercantum dalam agenda pembangunan 2030 yang merupakan agenda internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda ini diharapkan dapat mendorong perubahan berdasarkan kepentingan hak asasi manusia dan kesetaraan agar tercapai kemajuan pembangunan secara sosial, ekonomi, lingkungan hidup, ataupun hukum. Permasalahan eksploitasi hak anak dibahas melalui target SDGs ke-16 yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai dengan menyediakan akses keadilan bersama. Dalam UU No. 23 pasal 13 tahun 2002 dijelaskan mengenai perlindungan anak yang juga menjelaskan hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan oleh anak seperti, Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lain yang bertanggung jawab langsung atas pengasuhan tersebut berhak mendapat perlindungan dan perlakuan, dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman atau penganiayaan, dan keadilan. Terpenuhinya hak terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua namun juga setiap aktor nasional maupun internasional, pasalnya pemenuhan hak anak ini telah

dijadikan agenda global yang perlu dicapai bersama. Salah satu aktor yang melihat pentingnya peran anak ialah *Save the Children*, secara global partisipasi *Save the Children* dimulai sejak 1919 setelah Perang Dunia I dipelopori oleh Eglantyne Jebb seseorang yang fokus terhadap permasalahan anak-anak beliau memiliki peran historis karena telah merancang Deklarasi Hak Anak yang diadopsi Liga Bangsa-bangsa pada tahun 1924. Di Indonesia sendiri *Save the Children* beroperasi sejak tahun 1976 melalui aksi tanggap darurat bencana yang kemudian mengalami transisi hingga menjadi anggota perhimpunan global *Save the Children* yang diakui sebagai organisasi nasional yang dipercayai telah melayani kebutuhan dan advokasi hak anak melalui berbagai upaya sehingga terciptalah lingkungan aman bagi anak-anak dalam berkembang [4].

Menanggapi peningkatan eksploitasi selama pandemi Covid-19 khususnya terhadap kasus pekerja anak di Indonesia *Save the Children* mengupayakan dengan tetap melanjutkan program yang telah dijalankan melalui program perlindungan anak dan penanganan kemiskinan pada anak di Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat. Penerapan dilakukan melalui pendekatan *Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS)*, *Cocoa Life*, dan *Responsible Cocoa*. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia membuat perkebunan kakao memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat petani pekebun, keluarga petani kakao termasuk kedalam anggota rumah tangga pertanian dimana tergolong dari 55% jumlah penduduk miskin di Indonesia [5]. Faktor tersebut membawa dampak bagi anak yang tumbuh besar dari keluarga petani kakao karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab permasalahan pemenuhan hak perlindungan terhadap anak, termasuk didalamnya merupakan praktik pekerja anak. Provinsi Sulawesi merupakan wilayah budidaya lumbung kakao terluas di Indonesia dengan 65% luasan lahan yang tersebar di seluruh Indonesia dan Sulawesi Selatan merupakan salah satunya dimana hamparan kebun kakao sangat mudah ditemukan saat menelusuri jalan desa [5]. Sektor pertanian pun masih menjadi penggerak ekonomi yang dominan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Demam kakao yang dirasakan pada awal tahun 1980-an dimana saat itu para petani mendapat keuntungan yang besar akibat penanaman secara serempak menjadi awal mula meningkatnya pekerja anak di banyak daerah yang tersebar di Sulawesi Selatan. Faktor ini kemudian menjadi alasan mengapa *Save the Children* mengupayakan beberapa programnya di Sulawesi Selatan. Bukan hanya melalui programnya sendiri, *Save the Children* juga sepakat untuk turut berpartisipasi dalam agenda nasional pemerintah dalam mengupayakan penurunan angka pekerja anak salah satunya melalui program bersama dalam Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Program ini merupakan penjabaran rangkaian aksi mengenai permasalahan kunci dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBTA) dengan kata lain Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 disusun untuk mendukung pelaksanaan RAN-PBTA [6]. Terhadap pelaksanaannya pemerintah mengundang seluruh pemegang kepentingan yang bergerak untuk saling bersinergi terhadap persoalan tentang anak dan turut berperan mewujudkan tujuan Indonesia Bebas Pekerja Anak, salah satu alasan disusunnya Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak pun sebagai penyempurnaan dari rancangan sebelumnya dalam lebih lagi mewujudkan kerja sama antara para pemegang kepentingan baik instansi pemerintah, non-pemerintah, ataupun organisasi kemasyarakatan. Persoalan pekerja anak juga tercantum dalam agenda pembangunan yaitu dalam pilar 8.7 tentang Masa Depan Tanpa Pekerja Anak dengan mengakhiri dan menghapus segala bentuk perbudakan anak, perdagangan anak, dan pekerja anak untuk itu setiap komitmen perlu untuk diimplementasikan dengan tepat dan cepat.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode ini digunakan dalam meneliti suatu kondisi obyek secara alamiah yang dapat terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam melihat suatu fenomena/gejala tertentu [7]. Dengan metode ini data yang didapatkan akan mengandung makna yang mendalam yang merupakan sebuah nilai dari suatu data. Menurut Bogdan dan Taylor (1982) penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang ataupun perilaku individu yang dapat diamati [8]. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini ialah studi kasus digunakan dalam mengetahui dan memahami sebuah masalah yang ada dengan mengumpulkan informasi untuk di olah menjadi sebuah solusi agar masalah yang diteliti dapat diselesaikan [9]. Ciri umum pendekatan penulisan ini antara lain, tatanan alami dengan sumber data yang bersifat langsung, alat instrumen yang digunakan ialah manusia, sifatnya deskriptif, mementingkan proses bukan hasil ataupun produk, analisis data bersifat induktif, tujuan atau keperluan penelitian adalah untuk menyatakan sebuah makna. Oleh karena itu dapat diungkapkan bahwa penelitian kualitatif lebih menfokuskan terhadap pemahaman secara mendalam terhadap sebuah masalah, teknis

analisis yang dilakukan juga secara mendalam dengan mengkaji masalah secara khusus karena dari pemahaman kualitatif menganggap sifat dari suatu masalah berbeda satu dan yang lain.

Metode penulisan yang digunakan ialah Teknik Dokumentasi dan Studi Kasus. Teknik dokumentasi merupakan sebuah kajian yang fokus terhadap analisis ataupun interpretasi data tertulis berdasarkan konteks sebuah permasalahan, informasi Teknik dokumentasi dapat diperoleh melalui fakta dalam bentuk dokumen berupa buku, jurnal, artikel, majalah, film, dan sumber sejenisnya yang digunakan dalam menggali informasi di masa lalu. Bentuk informasi berupa barang tertulis sehingga proses pencarian data diolah dari hasil telusuran data yang sudah ada tentang seseorang ataupun kelompok orang, peristiwa, ataupun kejadian yang terjadi di situasi sosial yang berguna dalam penelitian kualitatif [8]. Teknik dokumentasi ini juga meliputi teori, dalil, ataupun hukum yang berhubungan dengan setiap masalah dari penelitian tertentu sehingga perlu dipastikan kredibilitas lewat keotentikan sumber naskah. Menurut Stake teknik studi kasus bersifat natural dari sebuah fenomena tertentu berbasis pada budaya atau minat penulis terhadap sebuah fenomenologi tertentu, karakteristik studi kasus biasanya sasarannya bersifat tunggal, masalah bersifat sederhana hingga kompleks, tujuannya untuk memahami suatu kasus secara mendalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah pendalaman literatur dimana peneliti akan melakukan pencarian literatur berupa data sekunder yang diperoleh baik dari laman publikasi internet ataupun studi kepustakaan lainnya, kemudian data yang didapatkan akan diklasifikasikan secara singkat untuk kemudian dapat di analisis. Proses analisis dalam penelitian kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan menemukan suatu hal penting [10]. Dari analisis kemudian dilakukan penyajian data untuk memperkuat hasil analisis peneliti dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan dengan menyelaraskan hasil penelitian peneliti dengan data yang telah didapatkan dimana hal ini merupakan tahap terakhir dari proses penulisan.

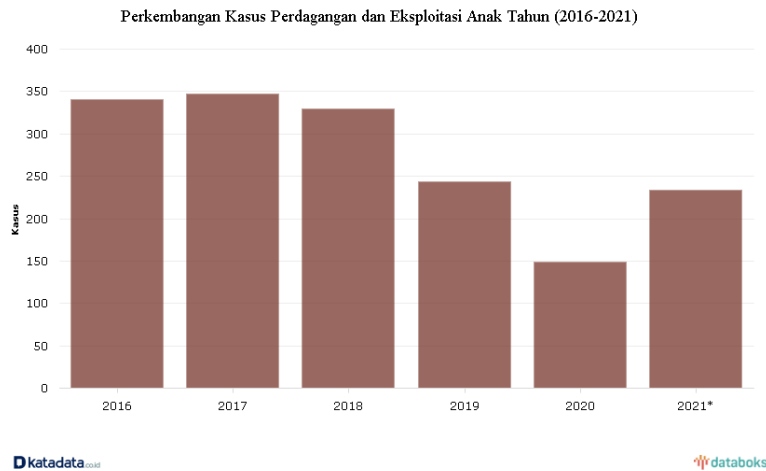
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Eksploitasi Anak dan Pengaruhnya Terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030

Eksploitasi meliputi aksi pemerasan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar, dan penguasaan. Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang yang didapatkan oleh anak dari masyarakat ataupun orang terdekat mereka sendiri dengan tujuan penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar [11]. Tindakan ini dapat di picu oleh beberapa faktor tertentu seperti ekonomi, sosial budaya, bahkan politik namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor rendahnya perekonomian menjadi alasan dominan dari tindakan eksploitasi dilakukan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2022 yang mengatur mengenai perlindungan anak, bentuk eksploitasi terhadap anak terbagi menjadi Eksploitasi Fisik, Sosial, dan Seksual [12]. Secara fisik anak diberdayakan untuk menghasilkan keuntungan bagi orang tertentu dengan dibiarkan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka, tidak jarang mendapatkan tekanan secara fisik yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan mengancam nyawa. Eksploitasi Sosial mengancam perkembangan emosional anak karena tindakan yang mereka dapatkan berupa ancaman verbal, penghinaan, penolakan, ataupun non-verbal seperti hukuman yang berdampak terhadap mental seorang anak. Eksploitasi Seksual sendiri meliputi tindakan yang melibatkan anak melakukan kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, kegiatan ini mengarah kepada aksi pornografi termasuk tindakan prostitusi terhadap anak.

Korban eksploitasi anak dilihat sejak 2016-2020 mengalami peningkatan di beberapa tahun, pada tahun 2016 didapati 340 korban eksploitasi yang ditemukan dalam kurun waktu satu tahun, di tahun berikutnya mengalami peningkatan angka korban dengan jumlah sebesar 347 anak, kabar baiknya pada tahun 2018 sempat terjadi penurunan angka korban yang terus menghasilkan jumlah penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2020 dengan menyentuh angka 149 korban eksploitasi anak yang tercatat di Indonesia. Pada kenyataannya penurunan kasus ini tidak bertahan lama karena di tahun 2021 per-bulan April jumlah korban kembali meningkat dengan total sebanyak 234 korban eksploitasi. Kasus ini terdiri dari 217 jumlah korban yang terkait prostitusi, 14 korban eksploitasi, dan tiga orang sisanya merupakan korban yang terlibat kasus perdagangan anak [13]. Pada tahun 2022 jumlah korban tidak banyak mendapati perubahan dengan jumlah korban sebanyak 216 jiwa yang berarti hanya menurun dengan jumlah sangat kecil. Hal ini cukup menggambarkan betapa rentannya kasus eksploitasi yang melibatkan anak di bawah umur dapat terjadi khususnya di Indonesia, bahkan dalam kurun waktu empat bulan saja jumlah korban dapat meningkat cukup pesat [14]. Hal mendasar diduga diakibatkan oleh krisis pengasuhan keluarga, adanya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik bagi anak, hingga

kemerosotan ekonomi keluarga. Fakta ini cukup menjadi kekhawatiran tersendiri khususnya bagi pemerintah untuk memberi awasan kepada orang tua maupun orang terdekat dari anak di bawah umur untuk berhati-hati kepada segala motif kejahatan yang bisa datang dari berbagai cara.



Gambar 1. Angka Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021)
 Sumber: Katadata Media Network

Kerangka kerja dunia yang disepakati sejak tahun 2015 mengenai serangkaian tujuan pembangunan yang akan digarap dengan periode waktu 2016-2030 menghasilkan dokumen penting yang dinamakan “Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development”. Dokumen tersebut mendeklarasikan beberapa hal penting terkait anak seperti berikut: Dunia yang menjamin anak dan pertumbuhan anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, Berkomitmen didasari tujuan-16 untuk menghentikan pemanfaatan, eksploitasi, perdagangan, dan setiap bentuk kekerasan yang mendasari anak, Komitmen memberdayakan anak, dan Menyatakan bahwa anak dan anak perempuan atau laki-laki adalah mitra penting dari perubahan sehingga perlu difasilitasi untuk dapat berpartisipasi dalam membangun dunia yang lebih baik. Dokumen ini menjadi penentu nasib jutaan anak di seluruh dunia dan Indonesia terutama untuk membawa dampak positif lewat perlindungan bagi anak melihat semakin maraknya kejahatan dan kekerasan terhadap mereka [15].

Terhadap permasalahan terkait kekerasan ataupun eksploitasi telah menjadi komitmen pemerintah ataupun aktor penggarap lainnya sehingga sudah sewajarnya untuk diwujudkan lewat pencegahan ataupun penanganan dan menjadikannya agenda penting dari pembangunan global ataupun nasional. Meningkatkan jumlah eksploitasi terhadap anak beberapa tahun kebelakang terutama saat pandemi Covid-19 melanda yang juga berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan di Indonesia membuat 11 juta anak dari rumah tangga mengalami kerentanan potensi tereksplorasi khususnya menjadi pekerja anak. Peristiwa ini sangat berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga diyakini menjadi persoalan yang serius mengingat betapa pentingnya peran anak terutama pada tahun 2030 dimana 70% anak bangsa ditargetkan sebagai generasi produktif yang akan bekerja secara langsung dibidangnya masing-masing. Keterhimpitan ini berimplikasi pula terhadap peningkatan anak putus sekolah yang berdampak pada pendidikan dan kualitas generasi penerus bangsa. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini setiap aktor di dorong untuk dapat mendeteksi dini, mengidentifikasi, dan memperkuat sinergi dalam menangani kasus eksploitasi anak. Presiden Joko Widodo juga turut meresponi dengan mengarahkan terkait tindakan pencegahan ataupun penghapusan eksploitasi anak khususnya yang berbentuk pekerja anak, diwujudkan langsung lewat implementasi Desain Rencana Strategis Penurunan Pekerja Anak 2020-2024 dengan melibatkan banyak sistem lain seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk turut mengevaluasi kebijakan yang ada [16].

Melalui permasalahan yang terjadi penting untuk diketahui bahwa tercapainya kesejahteraan anak merupakan salah satu penanda penting dari kemajuan dalam agenda capaian Program Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Bahkan dari ke-17 tujuan penting yang telah disepakati tercantum dalam indikator SDG’s, beberapa tujuan mengarahkan fokus pada kepentingan anak-anak hingga memberikan

penekanan yang kuat terhadap kesetaraan yang ditargetkan dapat dirasakan anak pada tahun 2030 mendatang. Hal ini dapat dijadikan indikator penting bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hanya dapat tercapai ketika semua anak yang tersebar di seluruh Indonesia dapat terjangkau dengan baik, untuk itu setiap program yang direncanakan juga harus memperhatikan beberapa hal penting seperti memastikan perkembangan otak, potensi, serta mendukung pertumbuhan anak yang sejahtera. Tidak boleh diabaikan pula terkait pentingnya partisipasi anak dalam proses pembangunan berkelanjutan sesuai komitmen dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mendorong untuk setiap pemerintah di dunia untuk meresponi kebutuhan spesifik anak.

Perkembangan Kasus Pekerja Anak di Masa Pandemi Covid-19

Pekerja Anak merupakan salah satu bentuk dari tindakan eksploitasi terhadap anak yang dimaknai dengan pekerjaan yang dilakukan secara rutin oleh anak untuk orang tuanya, orang lain, atau dirinya sendiri dengan jangka waktu tertentu baik menerima imbalan atau tidak. Pemahaman terhadap pekerja anak dilandaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara global situasi pekerja anak mengalami tren yang terus membaik bahkan tahun 2016 dunia berhasil menghapuskan 100 juta pekerja anak, di hitung sejak tahun 2000 dalam dua dekade. Progres ini terus membaik hingga empat tahun terakhir angka pekerja anak dunia kembali meningkat mencapai 160 juta pada tahun 2020. Jumlah penyebaran tersebut dikategorikan menjadi 79 juta anak yang bekerja dalam sektor berbahaya dimana 70% tersebar melalui sektor pertanian, 122,7 juta pekerja anak datang dari wilayah pedesaan dan 37,3 juta di perkotaan [17]. Demikian bagi Indonesia sendiri pada tahun 2019 angka pekerja anak berhasil diturunkan sampai 920 ribu anak setelah sebelumnya tercatat terdapat 1,2 juta anak yang bekerja. Angka penurunan kembali meningkat pada tahun 2020 dengan tersebarnya 1,33 juta anak yang bekerja di Indonesia [18].



Gambar 2. Persentase Pekerja Anak di Indonesia (2017-2022)
Sumber: Data Indonesia

Krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi global Covid-19 memberikan dampak terhadap pemutusan hubungan kerja bagi sebagian masyarakat. Menurut data World Bank ekonomi global saat pandemi melonjak sebesar 5,2% di tahun 2021 bahkan dinobatkan menjadi resesi terburuk sepanjang 80 tahun silam, jutaan orang pun kehilangan pekerjaannya hingga diprediksi bahwa krisis besar ini akan mendorong 70 – 100 juta orang kepada kemiskinan ekstrem [19]. Melihat keadaan yang ada PBB memprediksi bahwa setidaknya 24 juta anak di dunia akan putus sekolah dan terjerumus kedalam pekerjaan di bawah umur. Indonesia sendiri lebih dari 1,2 juta pekerja baik dari sektor formal maupun informal diberhentikerdjakan, pandemi juga mendorong Indonesia mencapai 27,54 juta orang kepada angka kemiskinan pada Maret 2021 yang terus meningkatkan peringkat kemiskinan yang tinggi sejak bulan Maret 2017 silam [19]. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya pekerja anak, sebagai tindakan untuk membantu orang tua mereka keluar dari sulitnya perekonomian kemudian

membawa anak-anak kepada tindakan pekerja paksa. Tidak dapat di tepis bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pergeseran ekonomi global maupun nasional yang membuat tingkat pengangguran pun mengalami peningkatan. Hal ini membuat anak dari keluarga tergolong berpendapatan rendah naik sebesar 142 juta di tahun 2019, sekolah pun banyak mengalami penutupan yang semakin meningkatkan resiko anak menjadi pekerja anak [17].

Karakteristik pekerja anak dikategorikan melalui beberapa faktor seperti jenis kelamin, daerah tempat tinggal, kelompok umur, provinsi, tingkat pendidikan, dan lapangan usaha mereka. Berdasarkan karakteristik yang ada dapat disimpulkan bagaimana pandemi Covid-19 berdampak terhadap kasus pekerja anak di Indonesia. Menurut jenis kelamin saat pandemi Covid-19 telah muncul pada tahun 2021 proporsi pekerja anak laki-laki dan perempuan hampir sama jumlahnya, padahal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jika dibandingkan proporsi pekerja anak laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan namun pandemi membuat jumlah pekerja perempuan mengalami peningkatan sehingga tidak ada perbedaan signifikan antar keduanya. Dari daerah tempat tinggalnya jumlah pekerja anak di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan saat pandemi Covid-19, hal ini dikarenakan maraknya pekerjaan informal yang dijalankan oleh anak-anak dan faktor wilayah agraris Indonesia yang sebagian besar masyarakat desa berprofesi sebagai petani. Berdasarkan provinsi wilayah Sulawesi khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara selama tiga tahun terakhir menghasilkan proporsi pekerja anak tertinggi yang meningkat pesat pada tahun 2020 namun penurunan angka mampu diwujudkan walaupun masih dikategorikan sebagai wilayah dengan pekerja anak terbanyak di Indonesia hingga tahun 2021 [20].

Strategi Penanganan Kasus Pekerja Anak

Besarnya pengaruh kenaikan angka pekerja anak akibat Covid-19 pemerintah menyerukan berbagai upaya melalui penguatan kolaborasi dan koordinasi untuk mencegah meningkatnya eksploitasi anak sesuai komitmen Indonesia dalam menghapuskan perbudakan modern, perdagangan manusia, dan pekerja anak pada 2030. Upaya ini dilakukan demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkhusus untuk tujuan 8.7 tentang tindakan cepat memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan manusia dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan tahun 2025 dapat mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuk.

Guna mencapai tujuan tersebut pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2021 memaparkan tujuh upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kenaikan kasus pekerja anak akibat Covid-19. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah pedesaan dan kepada kelompok rentan untuk peduli terhadap pemenuhan hak anak sehingga tidak melibatkan mereka kedalam pekerjaan berbahaya. Kedua, membentuk langkah koordinasi untuk mengembalikan anak ke pendidikan melalui berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan kepada pekerja anak dari kelompok rentan dengan program pelatihan berbasis komunitas pada lapangan kerjaa. Keempat, memfasilitasi bantuan sosial pada kelompok buruh dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 terutama bagi keluarga rentan terhadap pekerja anak. Kelima, melakukan pemeriksaan ke perusahaan yang terduga mempekerjakan anak. Keenam, melakukan sosialisasi terkait norma kerja anak kepada para stakeholder. Terakhir, mencanangkan kawasan bebas pekerja anak di beberapa wilayah [21].

Tidak hanya melalui ketujuh upaya tersebut pemerintah juga membentuk kebijakan yang berkaitan dengan pekerja anak seperti, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) 2002 – 2022 dan Peta Jalan Menuju Bebas Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2022. Rencana Aksi Nasional merupakan kerangka kebijakan yang di bentuk untuk penghapusan pekerja anak termasuk bentuk-bentuk terburuknya. Kegiatan khusus yang di lakukan selama tiga fase dari RAN-PBPTA ini mencakup pengembangan rekomendasi dengan NGO atau INGO, meningkatkan kesadaran dan advokasi, serta mengintegrasikan pekerja anak dengan merumuskan kebijakan dan peraturan sektoral [22]. Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 sendiri dirancang untuk mendukung pelaksanaan dari RAN-PBPTA mengenai gambaran inti permasalahan menurut pengalaman aksi yang telah dilakukan selama sepuluh tahun tahap pertama untuk mencapai percepatan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 [6]. Setiap pihak yang berperan dalam menjalankan tugasnya akan berpacu dari rangkaian Peta Jalan ini dikarenakan dalam penyusunannya telah di bentuk untuk memadukan peran pemerintah, sektor swasta, serikat buruh, serta pemangku kepentingan lainnya.

Upaya untuk menghapuskan pekerja anak di Indonesia juga diperkuat melalui kolaborasi dan koordinasi bersama beberapa pemangku kepentingan, salah satu contoh ialah International Labour Organization Indonesia (ILO) yang membuka kerjasama bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ketenagakerjaan dan JARAK, serta jaringan NGO yang juga bergerak menangani kasus pekerja anak. Koordinasi lebih lanjut dilakukan dalam webinar nasional yang dilaksanakan pada 12 Juni 2020 tentang Dunia Melawan Pekerja Anak. Webinar tersebut juga menjelaskan terkait hasil akhir dan perkembangan dari pekerja anak selama pandemi Covid-19 oleh ILO dan UNICEF, peningkatan kemiskinan menjadi masalah utama yang dibahas dalam webinar berdasarkan sumber yang ditampilkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, ILO Indonesia, SMERU Research Institute, dan Lembaga Pengkaji Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP). Pertemuan yang diadakan menghasilkan komitmen bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat melanjutkan upaya memerangi pekerja anak di Indonesia [23]. Upaya lain juga ditunjukkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan memberikan penghargaan khusus kepada para pihak yang telah melibatkan diri membantu program menurunkan angka pekerja anak sebagai strategi untuk mendorong seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus terlibat menurunkan pekerja anak. Koordinasi bersama juga ditunjukkan saat para pemangku kepentingan menghadiri pertemuan Hari Dunia Bebas Pekerja Anak 2021, pada saat itu KemenPPPA bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, *Save the Children*, dan PAACLA memberikan sejumlah penghargaan kepada 17 pihak pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga dan organisasi yang telah aktif melibatkan diri berperan dalam penghapusan pekerja anak [24].

Strategi dan Peran *Save the Children* Menangani Pekerja Anak

Sebagai wujud dari komitmen bersama menghapuskan pekerja anak di Indonesia salah satu pemangku kepentingan yang ikut menunjukkan perannya ialah *Save the Children* merupakan organisasi yang bekerja di lebih dari 120 negara dan enam benua. *Save The Children* telah beroperasi sejak 1976 di Indonesia, organisasi ini terus mengalami perkembangan hingga pada 2014 memulai transisi menjadi entitas lokal sekaligus anggota perhimpunan global *Save the Children* dan pada 2021 resmi menjadi *Yayasan Save the Children Indonesia* sebagai langkah strategis untuk memperluas manfaat organisasi bagi anak-anak di Indonesia. *Save the Children* memiliki ambisi jangka panjang bagi anak-anak Indonesia hingga tahun 2030 bersama tiga inisiatif global untuk bertahan hidup, belajar, dan terlindungi. Organisasi sendiri memiliki visi untuk membangun dunia sampai setiap anak memiliki hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Misi yang diharapkan untuk menginspirasi munculnya terobosan mengenai perlakuan dunia terhadap anak sehingga dapat tercipta perubahan yang cepat dan bertahan lama. Sepanjang tahun 2022 *Save the Children Indonesia* telah bekerja di 19 provinsi dengan 30 program [25].

Menanggapi pengaruh yang dirasakan anak oleh karena penyebaran Covid-19, *Save the Children* mengharapkan anak-anak diberikan ruang untuk dapat berpartisipasi sebagai bagian dari strategi penanganan Covid-19. Organisasi ini membawa empat hal penting antara lain, anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, belajar dengan baik, terlindungi dari kekerasan, dan anak-anak memiliki partisipasi terkait persoalan yang dirasakan [26]. Menurut survei yang di bentuk oleh *Save the Children* baik anak-anak maupun keluarga selama pandemi mengalami kesulitannya masing-masing. Akibat dari kejatuhan ekonomi akhirnya membuat orang tua kehilangan penghasilan sehingga layanan kesehatan dan obat-obatan sulit untuk mereka akses, kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak serta orang tua menurun, beban kerja rumah tangga anak perempuan meningkat yang membuat anak sulit belajar. Melihat kondisi tersebut *Save the Children* merekomendasikan kebijakan seperti, melakukan langkah untuk menghentikan penyebaran virus dengan memperluas penelusuran dan pengecekan kasus terutama kepada masyarakat marjinal selain itu juga memastikan penyebaran vaksin secara gratis. Memastikan bahwa jaringan pengaman sosial yang telah diperluas oleh pemerintah diterima setiap golongan masyarakat, Memastikan layanan kesehatan mental dan korban kekerasan bagi anak-anak terdampak pandemi, Membantu menjalankan program belajar jarak jauh yang inovatif serta memudahkan pendistribusian kebutuhan pembelajaran, Terlibat menyebarkan informasi terkait pengasuhan anak yang baik bagi para orang tua, serta Mempercepat tercapainya kesetaraan gender sesuai dengan tujuan SDG's untuk mengatasi permasalahan yang melekat pada masyarakat [27].

Menyikapi kasus pekerja anak *Save the Children* sendiri menunjukkan perannya melalui program Perlindungan Anak dan Penanganan Kemiskinan yang saat ini telah dijalankan di Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat [28]. Melalui program yang dibentuk kemudian diimplementasikan melalui pendekatan *Child Labour Monitoring and Remediation System* (CLMRS) atau sistem pemantauan

dan remediasi bagi pekerja anak, *Responsible Cocoa*, dan *Cocoa Life*. Beberapa program tersebut dibentuk untuk memastikan koordinasi pemantauan yang tepat melalui respon yang efektif agar anak lebih sejahtera dan terhindar dari pekerja anak. Program tersebut difokuskan kedalam wilayah pedesaan mengingat angka pekerja anak di wilayah tersebut lebih tinggi sehingga menjadi tantangan tersendiri, faktor ini memungkinkan dengan kondisi wilayah agraris yang dimiliki Indonesia serta dikenal sebagai produsen kakao terbesar di dunia. Bukan hanya itu risiko pekerja anak khususnya di wilayah pertanian juga tinggi, pasalnya perlu panduan kerja serta pengawasan yang tepat karena pekerjaan yang dilakukan secara fisik. *Responsible Cocoa* merupakan sebuah proyek untuk mempromosikan hak-hak anak bekerja sama dengan komunitas petani kakao Mars Wrigley di Provinsi Sulawesi Selatan, dibutuhkan sinergi dari banyak pihak seperti pelaku usaha, komunitas petani kakao, serta para pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem perlindungan anak. *Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS)*, proyek ini diusahakan untuk meningkatkan kehidupan petani kakao dan komunitas yang dimiliki dengan cara memastikan keselamatan anak dan keluarga di lahan pertanian kakao khususnya di Kabupaten Bone dan Wajo Sulawesi Selatan. *Cocoa Life* merupakan proyek *Save the Children* sendiri dengan membentuk komunitas kakao yang akan berkembang di masa depan untuk bisnis yang aman bagi masyarakat, berdiri didasari tiga pilar (Pengembangan Masyarakat, Mata Pencapaian, dan Keterampilan Orang Muda). Tidak berhenti disana *Save the Children* juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kepada kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sampai turun langsung dalam meningkatkan kesadaran petani kakao, orang tua, serta masyarakat tentang pemenuhan hak anak [29].

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah kerja *Save the Children*, sektor pertanian sangat dominan menggerakkan perekonomian warganya. Selain padi hasil perkebunan seperti cengkeh, lada, dan kakao sangat diminati para petani. Kakao sendiri telah dibudidayakan besar-besaran sekitar tahun 1950-an, pada umumnya pulau Sulawesi merupakan tempat budidaya kakao paling luas dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu lumbung kakao di Indonesia. Penanaman kakao serempak dilakukan tahun 1980 awal di Sulawesi Selatan, keuntungan berlimpah bagi para petani membawa kepada kemakmuran saat periode tersebut bahkan sebagian petani dengan mudah menyekolahkan anak mereka sampai perguruan tinggi. Sangat disayangkan tidak semua keluarga petani memiliki pemikiran demikian, sebagian besar justru kurang memperhatikan jenjang pendidikan dapat dilihat dari banyaknya anak putus sekolah dengan alasan lebih memilih bekerja sebagai petani kakao dan disetujui oleh keluarga mereka [5]. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kakao terbesar juga mempengaruhi, pasalnya tidak selamanya produksi kakao dapat menghasilkan keuntungan besar bagi para petaninya. Terlebih dikatakan bahwa tahun 2021 55% penduduk miskin yang tersebar di Indonesia berasal dari rumah tangga pertanian yang berarti juga melibatkan petani kakao, anak yang tumbuh besar dari keluarga petani kakao akan terkena dampak pekerja anak oleh karena faktor kemiskinan tersebut. *Save the Children* sendiri telah menerapkan program kakao sejak tahun 2015 di hampir 200 desa yang tersebar di Sulawesi Selatan dan juga provinsi lain oleh karena itu upaya perlindungan anak pun terus diupayakan. Dalam penerapan programnya *Save the Children* melakukan pendekatan dengan mitra lokal untuk program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), mitra lainnya yaitu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Indonesia (PKPA) yang juga memiliki pengalaman untuk program perlindungan anak di area perkebunan [30]. Kedua organisasi tersebut berkomitmen melakukan penelitian bersama dalam memetakan kesejahteraan anak Indonesia di sektor kakao. Proyek mencapai perlindungan anak yang diupayakan oleh *Save the Children* ini mendapat respon positif dari banyak pihak khususnya bagi para pemegang kepentingan atau masyarakat di Sulawesi Selatan. Misalnya oleh Bupati Wajo saat menghadiri Workshop Pembelajaran dan Penutupan Program Perlindungan Anak dengan Kakao Berkelanjutan 2022 yang digelar oleh *Save the Children* yang juga bekerjasama dengan Pemkab Wajo, Yayasan Wajo Foundation, dan Cargill. Adanya proyek ini dapat menjadi acuan dalam penguatan kapasitas masyarakat untuk menangani kasus perlindungan anak bahkan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam meremediasi pekerja anak [31]. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga merasa sangat terbantu karena sebelum adanya pendampingan oleh *Save the Children* mereka tidak memiliki keahlian lebih dalam hal pendidikan serta pengasuhan anak [32].

Menyikapi dampak dari Covid-19 sendiri *Save the Children* menunjukkan kontribusinya melalui empat sasaran antara lain, mitigasi penyakit, memastikan pendidikan anak tidak terganggu, perlindungan, dan keuangan keluarga yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Sasaran tersebut tidak bisa diabaikan terlebih untuk memulihkan keadaan selama pandemi berlangsung karena akar permasalahan dapat menimbulkan masalah baru bagi anak termasuk terhadap kasus pekerja anak. Upaya tanggap *Save the Children* terhadap Covid-19 berhasil membantu memulihkan kondisi masyarakat, contohnya pada bulan Maret-Desember

2020 terhadap sasaran kedua terkait membantu anak dalam belajar terdapat 20.956 anak yang awalnya terkena imbas penutupan sekolah namun *Save the Children* berhasil mendukung dengan akses pembelajaran jarak jauh. Sasaran ketiga terkait perlindungan terhadap kekerasan 40 anak didapati berhasil menerima dukungan perlindungan anak dari kasus kekerasan di rumah, kekerasan berbasis seksual, ataupun risiko perpisahan keluarga [33]. Upaya tanggap Covid-19 pun berlanjut hingga tahun berikutnya seperti di tahun 2021 terkhusus yang berkaitan dengan pekerja anak, intervensi *Save the Children* dalam perlindungan anak melalui program Sistem Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak (CLMRS) berhasil dikembangkan yang kemudian berkesempatan diuji coba oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2022. Setelah itu program ini diimplementasikan ke lebih dari 100 desa dalam komunitas rantai pasok kakao. Terhadap program tata kelola hak anak yang mendorong kepentingan anak-anak terdapat permasalahan yang dihadapi salah satunya terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 sampai 75 yang membicarakan terkait upah dan kesejahteraan pekerja anak, ketentuan ini menyatakan bahwa pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak yang menjadi permasalahan ialah ketentuan ini berhasil diterapkan di sektor formal namun gagal di sektor informal [34]. Tahun 2022 respon pandemi tetap berlanjut seperti dalam hal pendidikan *Save the Children* mendukung Upaya literasi kepada 9 komunitas membaca di Belu dan Malaka untuk meningkatkan kesehatan mental dan psikologis anak, untuk meningkatkan perlindungan anak juga telah dilakukan pelatihan terhadap pemerintah ataupun pekerja sosial di wilayah pedesaan sebagai upaya pengelolaan kasus kekerasan anak [35].

Strategi *Save the Children* dalam mengupayakan hak, perlindungan, dan partisipasi anak beberapa tahun kedepan telah disusun rencana strategis berupaya rangkaian lokakarya bersama beberapa pihak untuk mengembangkan rencana strategis organisasi periode 2022 – 2024. Rencana lokakarya ini disusun menjadi bagian dari perjalanan mewujudkan tujuan tahun 2030 untuk setiap anak dapat hidup lebih layak dan terjamin, dalam aksinya *Save the Children* melibatkan instansi pemerintah, lembaga mitra, dan anak-anak secara bertahap. Tahap pertama telah diluncurkan pada bulan Februari hingga Maret 2021 dengan menasar ke tingkat kabupaten/kota yang telah di akses saat implementasi program sebelumnya. Tahap kedua akan dilaksanakan di tingkat klaster atau regional Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, ketiga di tingkat nasional, dan terakhir bersama Dewan Pembina *Save the Children* atau anak-anak yang tergabung dalam anggota dewan perwakilan anak. Strategi ini banyak mendapat tanggapan positif contohnya oleh Kepala Desa Sinar Baru Timur Lampung yang bersyukur untuk pembimbingan di wilayah desa oleh *Save the Children* yang meningkatkan perlindungan anak ataupun partisipasi warga perempuan disana [36]. Program ini akan terus dijalankan serta di evaluasi melalui tahapan yang sudah berhasil dilimplementasikan untuk penerapan jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Meningkatnya kasus eksploitasi maupun pekerja anak bukan merupakan permasalahan baru di Indonesia bahkan sejumlah upaya telah diimplementasikan sebelumnya, hadirnya pandemi global Covid-19 menjadi persoalan baru yang mempengaruhi banyak sehingga dampaknya perlu di adaptasi oleh para aktor dalam jangka waktu tertentu. Relevansi hubungan antara permasalahan terkait eksploitasi ataupun pekerja anak dengan tujuan pembangunan nasional (SDG's) sangat erat, pasalnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan secara spesifik terkandung dalam tujuan 8 terkait Pekerjaan Layak atau tujuan 16.2 penghapusan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Pada umumnya permasalahan serta upaya untuk memenuhi kebutuhan anak banyak di bahas dalam poin pembangunan berkelanjutan seperti dalam tujuan terkait kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, ataupun dua tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh peran anak terhadap kemajuan suatu negara sangatlah penting bahkan dikatakan bahwa kesetaraan anak menjadi penanda keberhasilan pembangunan yang membuat para pemangku kepentingan terkait terus menggaungkan mengenai pentingnya partisipasi anak dalam setiap agenda nasional. Agenda Tujuan Pembangunan Nasional 2030 bukanlah menjadi tugas dari aktor tertentu saja bahkan agenda ini telah disepakati secara bersama maka dari itu keterlibatan dari jajaran pemerintahan, organisasi nasional maupun internasional, penggerak bisnis, ataupun masyarakat sangat diperlukan.

Komitmen yang ditunjukkan para pemangku kepentingan terhadap permasalahan anak sangatlah baik, dampak dari program-program yang dijalankan pun sangat membantu masyarakat sasaran program. Melalui hal ini dapat dirasakan bahwa pada praktiknya bukan hanya aparat pemerintah nasional saja yang dapat menghadirkan solusi terkait permasalahan nasional namun aktor non-pemerintah pun punya

dampak yang serupa. Seperti program yang diupayakan *Save the Children* di beberapa wilayah pedesaan nyatanya sangat membantu masyarakat melalui pemantuan, pemenuhan hak anak, perlindungan. Mengenai pekerja anak permasalahan tersebut memang belum dapat dihapuskan secara menyeluruh namun melalui program kerja yang *Save the Children* berhasil terapkan ke beberapa wilayah khususnya pedesaan yang dikategorikan sebagai wilayah penghasil pekerja anak terbanyak khususnya saat pandemi Covid-19 berkembang, menghasilkan perubahan seperti semakin banyak keluarga petani yang memahami pentingnya hak anak, terlindunginya pekerja anak yang masih ada melalui pemantauan yang di buat, bahkan sejumlah anak-anak berhasil mengakses pendidikannya kembali. Kesepakatan antara pihak yang memiliki tujuan yang sama jika dikolaborasi dalam kerjasama menjadi bukti keefektifan penyelesaian suatu masalah, oleh karena itu jika terus dikoordinasikan secara bersama bukan menjadi hal yang tidak mungkin kesejahteraan rakyat dapat tercapai tahun 2030 mendatang.

Saran

Para pemangku kepentingan perlu kapasitas lebih untuk adaptasi dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi terhadap sebuah kasus mengingat dunia akan terus berkembang dan seringkali mengalami perubahan, contohnya dengan pandemi Covid-19 yang terjadi. Untuk mengurangi kemungkinan kenaikan kasus dalam segala kondisi perlu dilakukan percepatan program di daerah sasaran, terhadap kasus eksploitasi ataupun pekerja anak telah ditemukan fakta bahwa wilayah pedesaan lebih rentan oleh karena itu perlu sinergi lebih banyak di daerah tersebut. Diperlukan lebih banyak upaya di wilayah lain terkhusus bagi yang belum terjangkau oleh pemerintah maupun non-pemerintah, pemetaan wilayah bisa dilakukan untuk mempermudah pengukuran urgensi sebuah kasus. Pola pikir masyarakat yang telah terbentuk seringkali menjadi hambatan pengelolaan kasus maka dari itu upaya seperti sosialisasi, pengarahan, pemantauan harus selalu diagendakan terutama kepada anak-anak dan keluarganya perlu diberikan pemahaman mengenai rencana pembangunan negara kedepan serta libatkan mereka untuk memberikan ide, masukan, dan argumentasi. Upaya kerjasama harus tetap dilakukan dan perlu di evaluasi secara berkala sehingga segala celah buruk dapat segera dihindari untuk peningkatan kualitas kasus yang lebih baik. Pemerintah telah mengupayakan beberapa program untuk menghapuskan pekerja anak salah satunya melalui agenda Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, hal itu perlu di evaluasi kembali terkait pengupayaan kasus selama tujuh tahun jika belum membuahkan hasil dapat ditindaklanjuti atau di bentuk program terusan dengan strategi yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Fuad Erfansyah et al., "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19," *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, vol. 3, no. 2, pp. 84–94, Dec. 2021, doi: 10.15642/jeced.v3i2.1189.
- [2] "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022 | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jan. 24, 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> (accessed Jul. 11, 2023).
- [3] "Hari Dunia Menentang Pekerja Anak: Pekerja anak meningkat menjadi 160 juta – peningkatan pertama dalam dua dasawarsa," International Labour Organization Indonesia, Jun. 10, 2021. https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_804223/lang--en/index.htm (accessed Jul. 06, 2023).
- [4] D. A. Putri, "PERAN SAVE THE CHILDREN SEBAGAI PEMBELA HAK ANAK," Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jan. 2019.
- [5] E. Rusdianto, "Menyelamatkan Generasi Petani Kakao," *Save the Children*, 2021. <https://savethechildren.or.id/cerita/menyelamatkan-generasi-petani-kakao> (accessed Jul. 10, 2023).
- [6] M. K. R. Indonesia, "PETA JALAN (ROADMAP) MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK," Jakarta, Dec. 2014.
- [7] Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 21st ed. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [8] Z. Abdussamad, *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif*, 1st ed. Syakir Media Press, 2021.
- [9] S. Rahardjo and Gunanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.

- [10] Iryana and R. Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," 2019.
- [11] M. Jannah, "EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA DAN REKONSTRUKSI ARAH KEBIJAKAN SOSIAL," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, pp. 8–10, 2017.
- [12] N. D. Simbolon, "ANALISIS EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI TEPIAN MAHAKAM KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [13] M. A. Rizaty, "Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021," *Katadata Media Network*, Jul. 21, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021> (accessed Jul. 06, 2023).
- [14] F. S. Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022," *DataIndonesia.id*, Mar. 07, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> (accessed Jul. 06, 2023).
- [15] "Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak menyongsong Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) - ECPAT Indonesia," *ECPAT Indonesia*, Sep. 16, 2015. <https://ecpatindonesia.org/en/news/mengakhiri-kekerasan-terhadap-anak-menyongsong-agenda-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/> (accessed Jul. 06, 2023).
- [16] "SEBELAS JUTA ANAK BERPOTENSI MENJADI PEKERJA ANAK DI MASA PANDEMI, PENTINGNYA SINERGI MELAKUKAN PENCEGAHAN," *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2810/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-pentingnya-sinergi-melakukan-pencegahan> (accessed Jul. 04, 2023).
- [17] I. A. Saifuddin, "Bertindak sekarang: Hapuskan Pekerja Anak WDAKL 2021 & Tahun Internasional Penghapusan Pekerja Anak," Jakarta, Jun. 2021.
- [18] M. A. Rizaty, "Angka Pekerja Anak Indonesia Turun pada 2021," *Katadata Media Network*, Mar. 31, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/angka-pekerja-anak-indonesia-turun-pada-2021> (accessed Jul. 04, 2023).
- [19] D. Yunitasari and D. Yusvitasari, "Pandemic and The Prevalence of Children's Rights Violation: Challenges on Combating Increased Exploitation of Children During The COVID-19 Outbreak in Indonesia," *SHAPE SEA*, May 2021, Accessed: Jul. 06, 2023. [Online]. Available: https://shapesea.com/wp-content/uploads/2021/05/Desi-Yunitasari-and-Devi-Yusvitasari_Pandemic-and-The-Prevalence-of-Childrens-Rights-Violation.pdf
- [20] "PEKERJA ANAK DI INDONESIA 2022 Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19," Dec. 2022.
- [21] "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Inilah Langkah Konkret Pemerintah Hapuskan Pekerja Anak," *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, Jun. 14, 2021. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/inilah-langkah-konkret-pemerintah-hapuskan-pekerja-anak> (accessed Jul. 04, 2023).
- [22] "Findings on the Worst Forms of Child Labor - Indonesia | U.S. Department of Labor," U.S. Department of Labour. <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/indonesia> (accessed Jul. 06, 2023).
- [23] "COVID-19 and child labour: Indonesia strengthen its efforts to combat child labour as an impact of the pandemic," *International Labour Organization*, Jun. 16, 2020. https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_748067/lang--en/index.htm (accessed Jul. 06, 2023).
- [24] "INDONESIA HADAPI TANTANGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERTANIAN, LEBIH DARI 800 RIBU ANAK TERJEBAK DALAM BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK," *KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, Jun. 24, 2021. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak> (accessed Jul. 04, 2023).

- [25] “Sejarah Save the Children Indonesia,” Save the Children. <https://savethechildren.or.id/tentang-kami/sejarah-kami> (accessed Jul. 06, 2023).
- [26] “Save The Children Berharap Anak-anak Diberikan Partisipasi Pengendalian COVID-19 - BNPB,” Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Apr. 11, 2020. <https://bnpb.go.id/berita/save-the-children-berharap-anakanak-diberikan-partisipasi-pengendalian-covid19> (accessed Jul. 06, 2023).
- [27] “Risalah Kebijakan BAGAIMANA KONDISI ANAK-ANAK INDONESIA SELAMA 3 BULAN PANDEMI COVID-19?,” Jakarta. [Online]. Available: <https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/read/29/2655/layanan-psikologi-sejiwa-hadir-sebagai-wadah-aduan-bagi-perempuan-dan->
- [28] “MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK 2022, SAVE THE CHILDREN DORONG PEMERINTAH INTERVENSI SELURUH EKOSISTEM PEMENUHAN HAK ANAK,” Save the Children, Jun. 15, 2022. <https://savethechildren.or.id/siaran-pers/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-2022-save-the-children-dorong-pemerintah-intervensi-seluruh-ekosistem-pemenuhan-hak-anak> (accessed Jul. 04, 2023).
- [29] “Perlindungan Anak - Save the Children Indonesia,” Save the Children. <https://savethechildren.or.id/kerja-kami/tematik/perlindungan-anak> (accessed Jul. 06, 2023).
- [30] “DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK,” 2023. [Online]. Available: www.kemendppa.go.id
- [31] Armansyah, “Tangani Pekerja Anak, Bupati Wajo Harap Program Save The Children Berlanjut - Rakyat Sulsel,” Rakyat Sulsel, Jan. 24, 2023. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/01/24/tangani-pekerja-anak-bupati-wajo-harap-program-save-the-children-berlanjut/> (accessed Jul. 06, 2023).
- [32] Lukman, “Luwu Utara | Website Resmi Kabupaten Luwu Utara,” [Luwuutarakab.go.id](http://luwuutarakab.go.id), Jul. 22, 2022. <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/misi-bersama-jangan-ada-pekerja-anak-di-perkebunan-kakao> (accessed Jul. 06, 2023).
- [33] “Desember 2020 RESPON TERKINI COVID-19 INDONESIA,” Jakarta, Dec. 2020.
- [34] “Laporan-Tahunan-2021-Save-the-Children-Indonesia,” Jakarta, 2021.
- [35] “OUR CURRENT RESPONSE Latest Number of Cases in Indonesia,” Jakarta, Nov. 2022.
- [36] P. Wirastama and D. Yuana Eko, “Menyusun Rencana Strategis Save the Children 2022-2024,” Save the Children, 2021. <https://savethechildren.or.id/cerita/menyusun-rencana-strategis-save-the-children-2022-2024> (accessed Jul. 10, 2023).